



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Anggaran Fantastis DPR tak hanya parfum
Tanggal	: Kamis, 16 April 2015
Surat Kabar	: Republika
Halaman	: 1-9

Anggaran Fantastis DPR tak Hanya Parfum

■ Bambang Noroyono

JAKARTA — Kesekretariatan Jenderal (Kesetjeraan) DPR merilis rencana anggaran ratusan miliar rupiah untuk pelaksanaan kegiatan di lembaga wakil rakyat tersebut. Selain merencanakan anggaran senilai Rp 2,3 miliar untuk parfum ruangan parlemen, sekretariat di lembaga legislatif itu juga punya anggaran lainnya yang dinilai mengada-ada.

Dari dokumen Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 2015, yang disalin dari web resmi lpse.dpr.go.id, selain dana parfum, Kesetjeraan DPR juga merencanakan anggaran untuk biaya pakan dan perawatan rusa.

Untuk Biro Umum, Kesetjeraan merencanakan anggaran senilai Rp 35,5 miliar. Anggaran terakhir ini direncanakan untuk penambahan tenaga keamanan. Nilai kontraknya mencapai Rp 18,1 miliar. Sisanya, untuk pengadaan

Bersambung ke hlm 9 kol 4-6

Anggaran Fantastis DPR tak Hanya Parfum | dari hlm 1

komputer lengkap di masing-masing ruang anggota dewan. Nilainya mencapai Rp 12,3 miliar.

Pengadaan komputer lengkap juga dialokasikan untuk ruang Setjen DPR. Nilainya lebih dari Rp 5 miliar. Sedangkan untuk kegiatan di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, dianggarkan sebesar Rp 7 miliar lebih.

Beberapa di antaranya, ialah untuk langganan internet selama setahun. Harga langganan internet sebesar Rp 2,7 miliar, dan pemasangan penangkap sinyal internet di gedung Nusantara I, senilai Rp 2,36 miliar.

Sekjen DPR Winantuningtyastuti menjelaskan, sebenarnya angka-angka yang tertulis di LPSE adalah pagu anggaran. Itu artinya, kata dia, jumlah anggaran tersebut barulah rencana dan batas atas penganggaran.

"Realisasinya *nggak* segitu," ujar dia, Selasa (14/4). Kata dia, menurut hasil lelang terbuka parfum ruangan gedung MPR/DPR RI ternyata menghabiskan anggaran senilai Rp 1,5 miliar.

Sedangkan untuk rusa, dia menerangkan, di gedung MPR/DPR RI tercatat ada 58 ekor rusa. Biaya makan dan perawatannya memang dianggarkan Rp 650 juta. Namun, realisasi penganggarannya cuma Rp 551 juta. Anggaran itu untuk

empat kegiatan pemeliharaan dan perawatan rusa selama setahun, serta gaji untuk satu dokter hewan dan lima orang perawat rusa.

Kepala Biro Humas Setjen DPR Djaka Dwi Winarko menambahkan, rencana anggaran tersebut sudah sesuai dengan rencana optimalisasi kinerja kelembagaan DPR. Kata dia, rencana terbesar memang diporsikan untuk kegiatan digitalisasi informasi dan kegiatan parlemen.

Djaka mengatakan, anggaran digitalisasi TV Parlemen itu sudah sesuai dengan proses lelang yang dilakukan terbuka.

"Tahun-tahun lalu ya sekitar segitu juga," kata dia, Rabu (15/4). Namun, Djaka tak mengomentari pertanyaan ketika anggaran tahun lalu un-

**Di gedung
MPR/ DPR RI
tercatat
ada 58 ekor rusa.
Biaya makan
dan perawatannya
memang
dianggarkan
Rp 650 juta.**

tuk digitalisasi itu tak menghasilkan peremajaan dalam pengembangan informasi dan kegiatan parlemen dengan cara digital. Menurutnya, rencana anggaran itu baru sebatas rencana untuk migrasi pemberitaan manual ke format digital.

Sekertaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Soetjipto menyatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan audit soal rencana dan penggunaan anggaran di Setjen DPR.

Setidaknya, kata dia, untuk pembuktian transparansi kegiatan penganggaran di Setjen DPR. Yenny menitikberatkan agar BURT mengambil peran dominan dalam melakukan evaluasi penganggaran di Setjen DPR.

Sebab, menurut dia, BUR sebagai badan yang mengurus kebutuhan Setjen DPR, menjadi wajib memanggil Sekjen DPR untuk mengevaluasi rencana anggaran tersebut.

"DPR dalam hal ini BUR berhak untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam penggunaan anggaran negara di Setjen DPR," ujar Yenni Rabu.

Namun, Yenny pesimistis BURT bisa mengambil peran itu. Karena, dia curiga, ada semua kesepahaman antara Kesetjeraan dan BURT, juga bersama Badan Anggaran (Banggar) untuk melosaskan setiap pengajuan rencana anggaran di lingkungan parlemen

■ ed: fitriyan zamza